

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahim, Diah Retno Dwi Hastuti, dan Abdul Malik, 2024, *Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia*, Jawa Tengah, Penerbit NEM.
- Abdul Majid, 2017, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Aksara Timur.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ani Sri Rahayau, 2018, *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Buku Panduan Akademik, 2020, *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Lhokseumawe, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia.
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Karima.
- Inu Kencana, 2013, *Ilmu Negara: Kajian Ilmiah dan Keagamaan*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Irfan Fachruddin, 2010, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Irfan Setiawan, 2018, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, Wahana Resolusi.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Nur Basuki Minarno, 2010, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama.
- Rina Yulianti, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Setya Retnami, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Sigit Sapto Nugroho dkk., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta, Oase Pustaka.

Siswanto Sunarno, 2020, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Yulia A. Hasan, 2021, *Hukum Laut: Konservasi Sumber Ikan di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU Perikanan).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

C. Disertasi/Skripsi/Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945." *Fiat*

Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/613>

- Akib, Muhammad. 2011. "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi." Tesis, Program Pascasarjana UNDIP. <https://eprints.undip.ac.id/40881/>
- Bayu Budhiraharja. 2024. *Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Dan Kelautan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember. [file:///C:/Users/USER/Downloads/REVERENSI%](file:///C:/Users/USER/Downloads/REVERENSI%20Jember%20Budhiraharja.pdf)
- Dahlan A. Rahman, dkk. 2024. "Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan Menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 9, No. 3. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Darwis Manurung. 2021. "Implikasi Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Prosiding Seminar Nasional Ke-3 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*. <https://repository.unja.ac.id/52529/1/BAB%20I.pdf>
- Fahrur Rosy dan Lutfian Ubaidillah. 2024. "Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 7. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/download/4479/4594>
- Frim Aldisun, dkk. 2016. "Analisis Yuridis Pengelolaan Sumber Daya Alam Kelautan-Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Di Kepulauan Riau." *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 1, No. 2. <https://ejournal.upbatam.ac.id/>
- Kanya Anindita Mutiarasari. 2022. "Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang, Apa Saja?" *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-undang-apa-saja>
- Muhammad Arba'in. 2022. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Skripsi, Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/16746/>
- Mumu Muhajir, Maria S. W. Sumardjono, Timer Manurung, dan Julius Ferdinand. 2020. "Harmonisasi Regulasi dan Perbaikan Tata Kelola Sumber Daya Alam di

Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol. 5, No. 2-2. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.479>

R. Agus Abikusna. 2019. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Sosial, Filsafat dan Komunikasi*, Vol. 13, No. 1. <https://maintenance.umc.ac.id/>

Sufi. 2020. “Evaluasi Program Perikanan terhadap Peningkatan Nilai Produksi Ikan Asin Teri di Kota Lhokseumawe (Studi Kasus di Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe).” *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.29103/njiab.v3i2.3054>

Taufiqurrahman Syahuri dan Euodia Octavia Sitompul. 2020. “Analisis Yuridis Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i2.25>

Wahyu Hadi Cahyono dan Rr. Herini Siti Aisyah. 2020. “Kewenangan Pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Daerah.” *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 2. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=77386639>

Yasser Arafat. 2022. “Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat di Era Resentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 4. <https://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/215/179>

Yelli Meivi Dapu. 2016. “Implikasi UU No. 23 Tahun 2014 Terhadap Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan.” *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 8. <https://doi.org/10.35796/les.v4i8.13003>

Zaenal Arifin dan Adhi Putra Satria. 2023. “Analisis Kritis Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Pasca Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014).” *Journal Unmas Mataram*, Vol. 14, No. 1. <https://www.academia.edu/download/87628979/123.pdf>

D. Internet

Antara News. “DKP Ajak Masyarakat Aktif Awasi Wilayah Konservasi Laut Aceh.” 21 Agustus 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3690408/dkp-ajak-masyarakat-aktif-awasi-wilayah-konservasi-laut-aceh>

Antara News. “Pemko Lhokseumawe Latih Warga Pesisir Manfaatkan Potensi Ikan Teri.” <https://www.antaranews.com/video/4938365/pemko-lhokseumawe-latih-warga-pesisir-manfaatkan-potensi-ikan-teri>

- Antara News. “Pemkot Lhokseumawe Fokuskan Pengembangan Budi Daya Perikanan Darat.” Antara Aceh, 27 Februari 2023. <https://aceh.antaranews.com/berita/245209/pemkot-lhokseumawe-fokuskan-pengembangan-budi-daya-perikanan-darat>
- Annaura Jasmine S. R. “Sumber Daya Manusia: Variabel Penting dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir.” *Marine and Coastal Policy Research (MCPR)*, 10 Mei 2023. <https://mcpr.komitmen.org/2023/05/10/sumber-daya-manusia-variabel-penting-dalam-pemanfaatan-wilayah-pesisir/>
- Asmadi. “Pelabuhan Perikanan Pusong Lhokseumawe Jadi Tempat Pendaratan Ikan.” *Antara Sumatera Barat*, 26 April 2018. <https://sumbar.antaranews.com/berita/224878/pelabuhan-perikanan-pusong-lhokseumawe-jadi-tempat-endaratan-ikan>
- Bidik Indonesia. “Pemko Lhokseumawe Dorong UMKM Olahan Ikan Teri Jadi Komoditas Unggulan Daerah.” 11 Juni 2025. <https://pemko-lhokseumawe-dorong-umkm-olahan-ikan-teri-jadi-komoditas-unggulan-daerah/>
- Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. “Profil – Tugas dan Fungsi.” <https://dkppp.lhokseumawekota.go.id/profil/read/tugas-dan-fungsi-202510221761115042>
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Lhokseumawe. “Profil Daerah Kota Lhokseumawe.” <https://jdih.lhokseumawekota.go.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://artikbbi.com/upaya/?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Upaya Pemerintah dalam Menekan Praktik Illegal Fishing*. 2023. <https://kkp.go.id>
- Nadia Faradiba. “Sumber Daya Alam: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contohnya.” *Kompas.com*, 2022. <https://www.kompas.com2021/08/29/110100523/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-manfaat-dan-contohnya>
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. “Gambaran Umum.” <https://jdih.lhokseumawekota.go.id/news/page/gambaran-umum>
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Pelatihan Nelayan Pesisir oleh DKPPP Kota Lhokseumawe*. 2023. <https://www.antaranews.com/video/4938365/pemko-lhokseumawe-latih-warga-pesisir-manfaatkan-potensi-ikan-teri>
- RRI. “DKPP Koordinir Penyerahan 270 Paket Konversi Gas Kapal Nelayan.” <https://rri.co.id/>

Saptoyo. "Tantangan Penegakan Hukum Illegal Fishing di Perairan RI." *Mahkamah Agung RI – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Marinews)*, 22 September 2024. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/>

Visual Republika. "Cegah Kejahatan Internasional, TNI AL Gelar Patroli Laut Terpadu." 19 Oktober 2023. <https://visual.republika.co.id/>